



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893
KECAMATAN SELUPU REJANG

RANCANGAN AWAL KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2023



Desa Kampung Baru Kode Pos 39153 Telp. 0732-22893
Email : bpbdr1@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karuniaNya kita tak henti-hentinya diberikan banyak nikmat, baik nikmat panjang umur, nikmat sehat maupun nikmat kesempatan, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan kemasyarakatan. Solawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya yang selalu konsisten terhadap ajarannya, Amin.

Pada prinsipnya rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong ini menyajikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, evaluasi kinerja tahun lalu, program dan kegiatan serta indikator kinerja dan kelompok sasaran. Strategi kebijakan program dan indikasi kegiatan adalah untuk mendukung proses penyelenggara tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong pada khususnya serta mendukung proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintahan melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah disusun perencanaan pengembangan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional.

Dalam konteks sistem perencanaan pembangunan maka pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dalam satu materinya mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi RPJP daerah, RPJM daerah dan Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD sebagai dokumen perencanaan 1 (Satu) tahun.

Curup, Februari 2022

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

The image shows a circular official stamp of the Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG" around the perimeter and "BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

Drs. Shalahuddin,M.si

NIP. 19690429 199503 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	.1
1.2 Landasan Hukum.....	.3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	.4
1.4 Sistematik Penulisan.....	5
 BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	 6
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah.....	23
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	28
 BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	 29
3.1 Telaah Terhadap kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	29
3.3 Program dan Kegiatan.....	30
 BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 36
4.1 Rencana Kerja.....	36
4.2 Pendanaan Perangkat Daerah	36
 BAB VI PENUTUP.....	 37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Mewajibkan Setiap Perangkat Daerah Untuk Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pedoman Kerja Selama Periode 1 (satu) Tahun Dan Berfungsi Untuk Menerjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan Yang Dituangkan Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kedalam Perencanaan Tahunan Yang Sifatnya Lebih Operasional.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyusun Ranwal Renja Tahun 2022.

Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong ini juga mengacu pada Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

1. Penyusunan Rancangan awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten . Daerah, hasil evaluais hasil renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun berjalan. Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup, analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

2. Penyusunan Rancangan

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnahkan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

3. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah berkoordinasi dengan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

4. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penyusunan Rancangan awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong menjabarkan rencana kegiatan BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi. BPBD

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Penyusunan Renja BPBD dari Rancangan Awal Renja sampai Rancangan Akhir Renja dipengaruhi oleh dokumen perencanaan lainnya yaitu Renstra BPBD rancangan awal RKPD dan rancangan akhir RKPD.

Pada penyusunan rancangan awal Renja BPBD tahun 2022 berpedoman Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten . hasil evaluasi hasil Renja BPBD tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan,

sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator kinerja serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah .

2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternative dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan.

Rancangan awal Renja kemudian disempurnakan menjadi rancangan Renja. Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi , sub kegiatan dan Prioritas daerah sasaran daerah pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan Renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah harus sudah selaras dengan rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dijadikan bahan penyempurnaan Rancangan RKPD.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembanguann Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 12 Tahun 2017 Tanggal 25 Oktober 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong.
- i. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulang Bencana
- k. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor : 30 Tahun 2014 pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013 Tentang penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023

1. Menjabarkan Rencana Kerja BPBD jangka pendek 1 (satu) tahun untuk tahun 2023
2. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan BPBD dengan mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya serta memperhatikan permasalahan yang ada, untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Tujuan penyusunan Rancangan Awal Renja BPBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur BPBD dalam menjalankan program /kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi BPBD dalam Pelaksanaann Pengurangan Resiko Bencana.

1.4. Sistematika

Sistematika Ranwal Renja BPBD Tahun 2022 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja
- 4.2 Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2022 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses program dan kegiatan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja bertujuan untuk : Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, sehingga tugas-tugas akan dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan responsive terhadap lingkungannya. Proses penyusunan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tersebut dilakukan melalui pembobotan bertingkat setiap tahapan dengan membandingkan target kinerja tahun lalu dengan capaian Rencana Strategis yang disertai dengan pembiayaan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Capaian Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2021

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasikan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Dalam penyusunan perencanaan tahun 2022, hasil evaluasi kinerja pada tahun 2020 menjadi salah satu input penting untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Selama Tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah memperoleh dana sebesar **Rp. 11.445.002.149,-** (*Sebelas Milyar Empat ratus Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ribu seratus Empat puluh Sembilan Rupiah*). terdiri dari :

Dana yang tidak terserap sebesar **Rp. 185.987.086,-** (*Seratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah*) dari Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong,

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong, target yang sudah ditetapkan dari sasaran program dan indikator kinerja dengan realisasi kinerja sudah dicapai yaitu :

1. Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk tahun 2021 adalah 26 % dengan realisasi 12 % dengan capaian 46 % termasuk kategori **Kurang Berhasil** Hal ini di sebabkan adanya Rekofusing anggota sehingga yang dapat di lakukan hanya Pelatihan Relawan BPBD Rejang Lebong sebanyak 95 orang dari 156 orang relawan.
2. Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca bencana dengan target 30 persen dan Realisasi 150 persen dengan capaian 500 persen. termasuk kategori **Sangat Berhasil** hal ini di sebabkan adanya dana hibah dari kementerian BNPB. Pelaksanaan Perbaikan Infrastruktur dapat di laksanakan yang semula ditetapkan 30 % atau satu lokasi namun dengan adanya dana hibah dapat dilaksanakan enam titik lokasi
3. cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2021 mendapat **nilai B** Termasuk kategori **Baik** atau 62,90 (Enam Puluh Dua koma sembilan puluh) dengan kategori sangat berhasil
4. Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 40 Persen realisasi 79,41 persen dengan capaian 198,5 Persen termasuk kategori **Sangat Berhasil**.

Dan untuk anggaran tahun 2022 dengan pagu Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 3.981.481.700,- dengan rincian 2 Program dan 8 Kegiatan, 17 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% , baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik, hal ini telah terlihat melalui LK (lembar kerja)/KAK (Kerangka acuan Kerja) masing–masing kegiatan.

Untuk memantapkan program dan kegiatan tahun 2022 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja-PD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun 2020. Evaluasi Renja

tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.1 (Table T.C- 29) dibawah ini:

Tabel 2.1 (T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Rejang Lebong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Kode								Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kerja	Indikator Program (Autcomes) Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Taget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
												Target Renja Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1								2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	1	05	03	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu								
1	05	1	05	03	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	13 dok	13	13	13	100%	13	13	100%
1	05	1	05	03	01	01	02	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 dok	13	13	13	100%	13	39	100%

1	05	1	05	03	01	01	06	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	72	9	13	134%	3	112	100%
1	05	1	05	03	01	01	07	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	12	12	10	81%	12	34	100%
1	05	1	05	03	01	01	08	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		36	12	12	100%	12	60	100%
1	05	1	05	03	01	01	10	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu		36	12	12	100%	20	60	100%
1	05	1	05	03	01	01	11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang di sediakan		36	12	12	88%	12	60	100%
1	05	1	05	03	01	01	12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang di sediakan		3	3	3	100%	3	9	100%
1	05	1	05	03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan		144	72	72	137%	72 eks	228	100%
1	05	1	05	03	01	01	16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		33	12	12	100%	33	66	100%
1	05	1	05	03	01	01	18	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik		120	61	61	100%	12	193	100%
1	05	1	05	03	01	01	19	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		24	12	12	100%	12	48	100%
1	05	1	05	03	01	01	20	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik		24	12	12	76%	12	48	100%

1	05	1	05	03	01	02		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat								100%
1	05	1	05	03	01	02	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia		12	2	8	80%	10	12	100%
1	05	1	05	03	01	02	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan		12	8	2	80%	10	12	100%
1	05	1	05	03	01	02	07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik		100	20	80	100%	100	100	100%
1	05	1	05	03	01	02	09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Jasa Kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya		12	2	6	80%	8	8	100%
1	05	1	05	03	01	02	10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan		100	100	100	100%	100	100	100%
1	05	1	05	03	01	02	14	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana		26	0	12	46%	3	12	100%
1	05	1	05	03	01	02	16	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	jumlah dokumen kajian resiko bencana yang dilegalisasi		0	0	0	0%	0	0	0%
1	05	1	05	03	01	02	22	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		100	20	80	100%	100	100	100%
1	05	1	05	03	01	02	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi		0	0	0	0%	0	0	0
1	05	1	05	03	01	02	29	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	jumlah warga dan Aparatus yang mengikuti pelatihan Pencegaha bencana		0	0	0	0%	0	0	0%

1	05	1	05	03	01	02	30	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil Pengendali oprasi dan penyedian sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	12	12	6	12	100%	12	12	100%
1	05	1	05	03	01	02	31`	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			3	2	6	500%	8	8	150%
1	05	1	05	03	01	03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik								
1	05	1	05	03	01	03	02	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Prioritas		0	0	80	8%	80	80	80%
1	05	1	05	03	01	03	03	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		19	19	19	100%	19	19	100%

Berdasarkan tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja dan pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari 2 (Dua) program dan (dua Puluh Lima) kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021, seluruhnya tercapai.

- Kolom 4 merupakan kondisi target kinerja tahun 2016 sampai dengan 2021
- Kolom 9 merupakan target program dan kegiatan tahun 2021
- Kolom 10 merupakan perkiraan realisasi capaian target Renstra Perangkat Daerah sampai tahun 2022

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja PD dan Renstra PD tidak terlepas dari adanya faktor pendorong pelaksanaan anggaran yang sudah berbasis kinerja (*Money Follow Program*)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan SKPD merupakan kajian terhadap capaian kinerja BPBD Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, baik IKK maupun indikator lain yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra 2016-2021 berdasarkan hasil analisis pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi BPBD serta norma dan standar pelayanan sesuai peraturan Perundang-undangan terkait kinerja pelayanan urusan Penanggulangan Bencana

BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BPBD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. Pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Ranwal BPBD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada SPM, Program Prioritas Pusat (BNPB) Program Prioritas Provinsi, dan Kabupaten .
- b. Penyusunan Ranwal BPBD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Ranwal BPBD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan Bencana.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Reviu Renstra BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2016-2021, analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator BPBD sebagai berikut:

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Capaian Analisa
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase Pelaksanaan Desa Tangguh Bencana, Sekolah madrasah Aman Bencana dan pelatihan relawan Tangguh Bencana yang di bentuk			3 %	3 %	3 %	5 %	170,53%	46%	33,33%	0%	Capaian Indikator pada Tahun 2021 sebesar 46 % Hal ini dikarenakan adanya rekofusing anggaran
	Persentase Survei Pasca Bencana dan Perbaikan serta pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana			70 %	75 %	75 %	75 %	100%	500%	80%	80%	Capaian indikator pada Tahun 2021 sebesar 500% di karenakan adanya dana hibah dari pihak BNPB

	Nilai Evaluasi Sakip							B	B	B	B	Capaian Predikat B keberhasilan ini di sebabkan daya dukung dari seluruh ASN BPBD
	Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana			70 %	75 %	75 %	75 %	100%	79,41%	100%	100%	Capaian 100 % keberhasilan ini di sebabkan Tingginya koordinasi dan informasi serta komitmen dari lintas sector

Adapun hasil analisis dari indikator BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 tersebut diatas adalah sebagai berikut:

dapat dianalisis bahwa pencapaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah berhasil , dengan sasaran strategis: Mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu pencapaian keberhasilannya, dengan realisasi kinerja rata-rata 204,875% (Dua Ratus Empat koma Delapan puluh Tujuh lima persen)

1. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mengurangi risiko bencana dengan meningkatkan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana dengan melaksanakan kegiatan pencegahan secara terencana terpadu. Dengan melakukan membentuk desa tangguh bencana, Sekolah Aman Bencana dan Pelatihan Relawan dengan target 26 % dengan realisasi 12% Hal ini untuk mendorong terwujudnya ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana.
2. Untuk tetap terjaga sarana dan prasarana serta tetap berjalannya layanan umum dan pemerintah saat pasca bencana di lakukan pembangunan infrastruktur pasca bencana sebesar 30 % dengan realisasi 150%.
3. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan daerah dengan melakukan pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu dengan predikat B
4. tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa dengan melakukan Penanganan Kedaruratan bencana dengan target sebesar 40% dengan realisasi 79,41% hal ini di maksud untuk mengurangi jumlah kerugian dan korban pada saat terjadi bencana.

1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dengan **Tujuan** untuk mempersiapkan relawan yang tangguh, terlatih dan dapat membantu di semua siklus bencana.

- Dalam Pelatihan Relawan bencana dapat dilaksanakan dengan anggaran relatif kecil.
- Partisipasi pihak Dinas terkait sangat tinggi.
- Sarana prasarana dan dukungan dari pihak luar cukup tinggi.

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan Pelatihan Relawan bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta melibatkan pihak lembaga.



PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN / KOTA

Relawan penanggulangan bencana adalah **seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya penanggulangan bencana**. Relawan bencana sendiri memiliki kewajiban, seperti mentaati peraturan dan prosedur kebencanaan yang berlaku. Kemudian, menjunjung tinggi asas, prinsip dan panca darma relawan penanggulangan bencana. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuannya dalam penanggulangan bencana. Selain kewajiban, relawan juga memiliki hak saat sedang menanggulangi bencana, di antaranya memperoleh pengakuan dan tanda pengenal relawan penanggulangan bencana. Selain itu, relawan juga mendapatkan peningkatan kapasitas yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Terakhir, relawan akan mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas penanggulangan bencana.

Dengan diadakannya kegiatan pelatihan relawan penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 ini diharapkan untuk kita semua memahami secara baik tugas dan fungsi relawan saat penanggulangan bencana dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu, efektif, efisien dan handal, karena penanganan kejadian bencana merupakan tolok ukur keberhasilan penanggulangan bencana.

Adapun pelatihan yang di latih sebagai Berikut :

- Cara pengamanan Lingkungan, Harta Benda saat bencana
 - Praktek2 pelaksanaan penanngulangan bencana saat bencana.
 - Pelatihan saat terjadi gempa.
 - Pelatihan pertolongan korban tengelam
 - Pelatihan cara mematikan gas yang bocor dan antisipasi bahaya kebakaran
2. Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan perbaikan infrastruktur pasca bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :
- Penyedian Anggaran yang mencukupi.
 - Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta
 - Informasi data yang akurat.
 - Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan.

 Rekonstruksi Pelapis Tebing, Box Culvert & Drainase Desa Dusun Sawah - Tanjung Dalam	 Jalan Jurusan Pal VII - Trans 50	 Pelapis Tebing & Drainase Tabarenah - Sukarami
 Rekonstruksi Jembatan Dusun Sawah	 Rekonstruksi Irigasi Air	 Rekonstruksi Sarana Air Bersih Desa Air Lanang
Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Rejang Lebong Menggunakan Dana Hibah BNPB RI Tahun 2021, seluruh konstruksi yang dibangun menggunakan konstruksi Benton Bertulang		

Rehabilitasi & Rekonstruksi memiliki tujuan “mendorong kawasan pemulihan terdampak bencana” dengan sasaran “meningkatnya pemulihan pasca bencana

Rehabilitasi adalah Perbaikan dan Pemulihan semua aspek layanan publik/ masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan **sasaran utama** Normalisasi/ berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana. **Rekonstruksi adalah** Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/ masyarakat dengan **sasaran utama** Tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan untuk tahun 2021 BPBD telah membangun kembali sarana umum sebanyak 6 titik lokasi.

3. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan



.cakupan implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja. Selain itu adanya penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja, evaluasi terhadap program dan kegiatan, evaluasi terhadap kebijakan instansi / unit kerja yang bersangkutan, maka dari hasil LHE inspektorat tahun 2021 mendapat **nilai B** Termasuk kategori **Baik** atau 62,90 (Enam Puluh Dua koma sembilan puluh) dengan kategori sangat berhasil. Faktor yang mempengaruhi pencapaian keberhasilan adalah Dukungan dari personil BPBD yang terkait dalam melengkapi bahan, data dan dokumen kelengkapan penilaian SAKIP BPBD

4. Persentase Respon Time Terhadap Penanganan Bencana dengan target 40 Persen realisasi 79,41 persen dengan capaian 198,5 Persen termasuk kategori **Sangat Berhasil**

Keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan di sebabkan beberapa faktor :

- Tingginya koordinasi dan informasi dalam pelaksanaan tanggap darurat
- Telah adanya pemahaman dan komitmen dari lintas sektor.
- Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana.
- Penentuan status kedaruratan bencana.

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Adanya Dana yang mendukung
- Adanya Peralatan peringatan dini
- Terbentuknya Tiem Reaksi Cepat
- Adanya Satgas di setiap desa
- Terlatihnya Anggota PusdalopSar



Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan penanganan kedaruratan perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Adanya Peralatan peringatan dini
- Terbentuknya Tiem Reaksi Cepat
- Adanya Satgas di setiap desa
- Terlatihnya Anggota PusdalopSar

Untuk pencapaian keberhasilan pelaksanaan perbaikan infrastruktur pasca bencana perlu dilaksanakan fakto-faktor antara lain :

- Penyediaan Anggaran yang mencukupi.
- Mengadakan peningkatan kerjasama dengan dinas terkait serta
- Informasi data yang akurat.
- Perlunya ada perubahan pelaksanaan perencanaan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kabupaten Rejang Lebong memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam maupun faktor manusia, Faktor Sosial dan dampak kerusakan non materi maupun psikologis. Meskipun perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong telah didesain sedemikian rupa dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan rasa keadilan, serta meminimalkan dampak perusakan yang terjadi pada lingkungan serta melindungi masyarakat terhadap ancaman bencana. Namun kenyataan pelaksanaannya masih seringkali terkendala upaya penanganan yang tidak sistemik dan kurang koordinatif.

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penanggulangan Bencana. disebutkan pula bahwa kejadian bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya. Hal ini berdampak lanjut menjadi potensi penghambat laju pembangunan Kabupaten Rejang Lebong yang telah menjadi agenda maupun prioritas para pemangku kepentingan (StakeHolder). Sedangkan beberapa hal yang menjadi **kelemahan** dan **ancaman** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

- Adanya Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease (Covid 19)
- Belum sepenuhnya penyelenggaraan penanganan bencana di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 terutama untuk kewenangan-kewenangan yang sebelumnya sudah ada di Kementerian / Instansi selain Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Terbatasnya anggaran yang tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah bagi kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia;
- Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam di dunia;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Telaah terhadap rancangan awal RKPD di maksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target sasaran program / kegiatan BPBD dari rancangan awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan sesuai dengan tufoksi .

Tabel T-C.31

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Rejang Lebong

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang
Lebong

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian		Pagu Indikator(Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian			Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	Persen	3.093.247.794	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100	Persen	3.093.247.794	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	12	Dok	22,435,512	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	12	Dok	22,435,512	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	22,435,512	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dok	22,435,512	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	Persen	2.627.139.027	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	Persen	2.627.139.027	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rejang Lebong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2.369.849.027	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rejang Lebong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	Bulan	2.369.849.027	

2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	257,290,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil penyediaan administrasi Pelaksanaan tugas ASN	12	Dokumen	257,290,000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rejang Lebong	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	100	Persen	197.742.259	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rejang Lebong	Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan evaluasi Perangkat Daerah yang di susun	100	Persen	197.742.259	
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rejang Lebong	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	3	Paket	21.799.766	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rejang Lebong	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	3	Paket	21.799.766	
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	3	Dokumen	197.742.259	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	3	Dokumen	197.742.259	
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	12	Dokumen	7,771,584	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang di sediakan	12	Dokumen	7,771,584	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	163.167.360	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi lain/Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	163.167.360	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	Persen	125.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	100	Persen	125.000.000	
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	Unit	125.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2	Unit	125.000.000	

5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rejang Lebong	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	Persen	43.831.236	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rejang Lebong	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100	Persen	43.831.236	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rejang Lebong	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	1.272.960	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rejang Lebong	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12	Laporan	1.272.960	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12	Laporan	36.205.920	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rejang Lebong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa, komunikasi, sumber daya air dan listrik yang tersedia	12	Laporan	36.205.920	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	Laporan	6.352.356	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rejang Lebong	Jumlah Laporan jasa pelayanan umum kantor yang di sediakan	12	Laporan	6.352.356	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	Persen	77.099.760,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	100	Persen	77.099.760,00	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Jasa Kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	12	Bulan	77.099.760	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rejang Lebong	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau Jasa Kendaraan jabatan yang dibayar pajaknya	12	Bulan	77.099.760	
II	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	5	Persen	1.242.523.200,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	5	Persen	1.242.523.200,00	
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5	Persen	1.073.040.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rejang Lebong	Persentase warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	5	Persen	1.073.040.000,00	

1	Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana	Rejang Lebong	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	Dokumen	251.328.000,00	Penyusunan Rencana penanggulangan Bencana	Rejang Lebong	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1	Dokumen	251.328.000,00	
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil Pengendali oprasi dan penyedian sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	12	Dokumen	251.328.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah Dokumen hasil Pengendali oprasi dan penyedian sarana prasarana kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	12	Dokumen	251.328.000	
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong		3	Lokasi	714.000.000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong		3	Lokasi	714.000.000	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100	Persen	169.483.200,00	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rejang Lebong	Pesentase sarana dan prasarana kebencanaan dalam kondisi baik	100	Persen	169.483.200,00	
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rejang Lebong	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Prioritas	20	Jumlah Lap Kejadian bencana	51.000.000,00	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rejang Lebong	Jumlah Laporan koordinasi respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah Prioritas	20	Jumlah Lap Kejadian bencana	51.000.000,00	
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20	Orang	118.483.200,00	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Jumlah korban bencana yang mendapat distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	20	Orang	118.483.200,00	
						4.335.770.994						4.335.770.994,00	

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Program kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat peripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa dan Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasikan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Rejang Lebong

Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten
Rejang Lebong

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penanggulangan Bencana/Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rejang Lebong	Persentase Warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong –royong”

MISI

1. Mewujudkan keamanan Nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar Negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.**
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan Nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk Periode satu Tahun anggaran dan mempunyai fungsi :

- a. Menjadi acuan bagi seluruh komponen yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi) , karena memuat seluruh kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran selama satu tahun;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong sedangkan **tujuan dan Sasaran** dari Rencana Kerja Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah mengacu pada Review Renstra Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong yaitu :
 1. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal
 2. Mengoptimalkan penanganan Darurat Bencana yang responsif dan dukungan logistik serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik.
 3. Meningkatkan pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
 4. Mengoptimalkan tata kelola kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Dan **Sasaran** yang ingin dicapai adalah mewujudkan :

1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana yang baik / optimal
2. Penanganan Darurat Bencana yang respronsif dan dukungan logistik Serta peralatan untuk penanganan Penanggulangan Bencana yang lebih baik
3. Pemulihan Masyarakat dan Sarana prasarana yang lebih baik.
4. Tata kelolah kebencanaan untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana;

3.3. Program dan Kegiatan

Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Pembangunan adapun **Tujuan** Meningkatkan kualitas penanggulangan bencana dengan **sasaran** Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana

3.3.1 Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan dan penetapan program dan kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan Program- program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Perumusan kegiatan BPBD Tahun 2023 mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan Stándar Pelayanan Minimal Kebencanaa.
2. Pecapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
3. Pencapaian tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2023
4. Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2023
5. Pencapaian Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2023

3.3.2 Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rancangan Awal Renja BPBD tahun 2023 disusun mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabuapten Pada tahun 2023 direncanakan ada 1 (Satu) program dan 2 Kegiatan) kegiatan 5 (Lima) Sub Kegiatan:

I	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
3	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

TABEL TC-33
PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH REJANG LEBONG

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
									Nasional	Daerah				
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						4.335.770.994							4.242.443.633	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Akuntabel dan Tepat Waktu	persen		persen	100 persen	3.093.247.794	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	ASN BPBD	100 persen	2.975.069.969	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen		dokumen	12 dokume	22,435,512	Rejang Lebong	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	ASN BPBD	12 dokume	22,884,222	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokume		Dokume	12 Dokume	22,435,512	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	ASN BPBD	12 Dokum	22,884,222	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	persen		persen	100 persen	2.627.139.027	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	ASN BPBD	100 persen	2.627.139.027	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan			14 Bulan	2.369.849.027	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	14 Bulan	2.369.849.027	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokume		Dokume	12 Dokume	257,290,000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	PNS dan THL	12 Dokum	257,290,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi umum perangkat daerah yg tepat waktu	persen		persen	100 persen	197.742.259	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	100 persen	201.697.105	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang di sediakan	3 paket		paket	3 paket	21.799.766	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	3 paket	21.799.766	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan pengandaan yang di sediakan	3 paket		paket	3 paket	5.003.549	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	3 paket	5.103.620	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang di sediakan	dokume		Dokume	12 dokume	7,771,584	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	12 dokume	7,927,016	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan		laporan	12 laporan	163.167.360	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	12 laporan	166.430.707	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	persentase pengadaan barang milik daerah yang baik	unit		unit	2 unit	125.000.000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	2 unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Praserana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan	Unit		Unit	2 Unit	125.000.000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima 3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	2 Unit	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	persen		persen	100 persen	43.831.236	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	100 persen	44.707.860	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedian Surat Menyurat	laporan		laporan	12 laporan	1.272.960	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	12 laporan	1.298.419	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedian jasa komonikasi sumber daya air dan listrikyang tersedia	laporan		laporan	12 laporan	36.205.920	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	12 laporan	36.930.038	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan umum kantor yang di sediakan	laporan		laporan	12 laporan	6.352.356	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	PNS dan THL	12 laporan	6.479.403	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pendataan barang milik daerah yg baik	unit		unit	2 unit	77.099.760	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	ASN BPBD	2 unit	78.641.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dibayar pajaknya	Bulan		Bulan	12 Bulan	77.099.760	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima	ASN BPBD	12 Bulan	78.641.755	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Pelaksanaan Penanggulangan Kebencanaan	persen		persen	100 persen	1.242.523.200	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	ASN BPBD	100 persen	1.267.373.664	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Warga yang mendapat pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	persen		persen	5 persen	1.073.040.000	Rejang Lebong	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	ASN BPBD	5 persen	1.094.500.800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang di legalisasi	dokumen		dokumen	1 dokumen	251.328.000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat Rejang Lebong	1 dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga dan Aparatur yang mengikuti Pelatihan Pencegahan Bencana	orang		orang	0	0	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat Rejang Lebong	30 orang	256.354.560	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pengendalian Oprasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	dokume		dokume	12 dokume	ⁿ 107,712,000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat Rejang Lebong	12 dokume	ⁿ 109,866,240	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Pasca Bencana yang di perbaiki	Lokasi		Lokasi	3 lokasi	714.000.000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat Rejang Lebong	3 lokasi	728.280.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase korban bencana yang mendapat penyelamatan dan evakuasi	persen		persen	100 persen	169.483.200	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	ASN BPBD	100 persen	172.872.864	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan		Laporan	20 Laporan	51.000.000	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat yang terdampak bencana	20 Laporan	52.020.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapat Distribusi Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	orang		orang	20 orang	118.483.200	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	2. Penguatan pelayanan dasar dan pengembangan infrastruktur	Masyarakat yang terdampak bencana	20 orang	120.852.864	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Total						4335770994							4242443633	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja

Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rejang Lebong, yang memuat kebijakan, program, Kkegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Rejang Lebong, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rancangan Awal Renja BPBD merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rejang Lebong.

4.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan daerah mencakup gambaran kinerja dan pengelolaan keuangan daerah tahun-tahun sebelumnya serta kerangka pendanaan. Gambaran pengelolaan keuangan daerah memberikan gambaran mengenai kemampuan anggaran daerah untuk membiayai belanja daerah. Kemampuan belanja daerah, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung akan menjadi acuan dalam pengalokasian anggaran pada masing-masing program yang akan dilaksanakan pada 5 tahun mendatang. Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mendasar kepada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintah serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan berkelanjutan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja tahunan merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan disusun dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal Kebencanaan Program Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan lokasi, prioritas daerah, sasaran daerah, capaian indikator serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah .

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ini disusun untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Adapun kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 disusun dengan pendekatan berdasarkan landasan hukum yang terkait.
2. Rancangan Awal Renja BPBD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 memuat tentang rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, indikator kerja, sasaran program, target yang akan dicapai serta penganggaran dana.
3. Rancangan Awal Renja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi BPBD Kabupaten Rejang Lebong dalam menyusun Renja serta sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan Pada Tahun 2023.